

Kucing Busok sebagai Modal Politik Lokal Pulau Raas: Konservasi, Tata Kelola, dan Strategi Pariwisata

Romario Rahadian Kiswoyo ^{1*}

¹ Department Ushuluddin and Dakwah, Universitas Islam Negeri Madura, Pamekasan, Indonesia

* Corresponding author: romariorahadian@uinmadura.ac.id

ARTICLE

Research Article

ARTICLE

Received: 21-07-2026 | Accepted: 21-08-2026

HISTORY

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kucing Busok sebagai modal politik lokal dalam konteks konservasi, tata kelola pemerintahan (*governance*), dan strategi pengembangan pariwisata berkelanjutan di Pulau Raas, yang masuk wilayah Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep, Madura, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Sebagai satu-satunya kucing ras endemik di Indonesia saat ini yang diakui secara internasional, Kucing Busok memiliki nilai ekologis, kultural, dan politik yang signifikan, sehingga berpotensi dimanfaatkan sebagai simbol identitas lokal dan instrumen kebijakan publik. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan menelaah jurnal ilmiah, buku, dokumen kebijakan, serta laporan lembaga terkait yang membahas politik lokal, konservasi satwa, *governance*, dan pariwisata berbasis komunitas. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk mengidentifikasi keterkaitan antara pelestarian fauna endemik dan pembentukan legitimasi politik lokal. Hasil kajian menunjukkan bahwa, pada tahun 1990-an, Kucing Busok sempat jadi oleh-oleh bagi tamu istimewa yang mengunjungi Pulau Raas Madura. Karena kegiatan itu, keberadaan Busok lambat laun semakin langka. Saat ini kemurnian genetik Kucing Busok dijaga secara ketat oleh masyarakat setempat melalui norma sosial yang melarang pengeluaran kucing ini dari Pulau Raas tanpa melalui proses kebiri atau sterilisasi. Praktik ini berfungsi sebagai mekanisme konservasi berbasis komunitas guna menjaga keaslian genetik dan keberlanjutan populasi. Upaya pelestarian tersebut semakin diperkuat dengan adanya pengakuan internasional dari *World Cat Federation* (WCF) pada November 2022 yang menetapkan Kucing Busok sebagai kucing ras asli Indonesia. Studi ini berkontribusi pada pengembangan kajian politik lokal dengan menempatkan fauna endemik sebagai modal politik strategis dalam kebijakan konservasi dan pariwisata berbasis identitas lokal, khususnya bagi segmentasi wisata pecinta hewan (*animal lovers*) global

KATA KUNCI Ekonomi Politik, Legitimasi Politik Lokal, Pasar Wisata Global, Politik Simbolik, Simbol Fauna Ras.

1. PENDAHULUAN

Fauna endemik dan hewan simbolik semakin memperoleh posisi strategis dalam dinamika pembangunan wilayah, tidak hanya sebagai objek konservasi ekologis, tetapi juga sebagai sumber daya simbolik yang dapat dikapitalisasi sebagai modal politik lokal. Dalam kajian ilmu politik dan kebijakan publik kontemporer, modal politik tidak semata dipahami sebagai dukungan elektoral atau kekuatan institusional, melainkan juga sebagai akumulasi legitimasi, simbol, dan identitas yang memungkinkan aktor politik terutama pemerintah daerah mengartikulasikan kebijakan secara efektif dan diterima publik. Dalam konteks ini, satwa endemik atau satwa ikonik berfungsi sebagai medium simbolik yang menjembatani kepentingan konservasi, tata kelola pemerintahan (*governance*), serta pengembangan pariwisata berbasis identitas lokal.

Literatur pariwisata berkelanjutan dan *political ecology* menunjukkan bahwa pemanfaatan satwa sebagai ikon destinasi telah menjadi strategi umum di berbagai negara. Hewan tidak lagi diposisikan semata sebagai objek biologis, tetapi sebagai *cultural signifier* yang mengandung makna sosial, ekonomi, dan politik. Studi-studi tentang *animal-based tourism* menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan wisata berbasis satwa sangat bergantung pada integrasi antara kebijakan publik, partisipasi masyarakat lokal, dan konstruksi simbolik yang dilekatkan pada hewan tersebut (Fennell, 2015; Markwell, 2015). Dalam kerangka ini, satwa dapat berfungsi sebagai instrumen legitimasi kebijakan sekaligus alat *place branding* yang efektif.

Pengalaman internasional memperlihatkan bagaimana kucing sebagai satwa yang dekat dengan kehidupan manusia dapat menjadi aset strategis dalam pembangunan pariwisata dan politik identitas lokal. Kota Kuching, Malaysia, misalnya, kucing telah dikonstruksikan secara sistematis sebagai simbol kota melalui kebijakan tata ruang, pengembangan museum tematik, dan integrasi ikon kucing dalam narasi pariwisata kota. Studi tentang *urban place branding* menunjukkan bahwa strategi tersebut berhasil memperkuat citra Kuching sebagai kota wisata berbasis identitas unik, sekaligus meningkatkan kohesi sosial dan kebanggaan lokal (Hankinson, 2015; Kavaratzis & Ashworth, 2017). Pengelolaan wisata Kota Kuching memperlihatkan bagaimana simbol kucing tidak hadir secara alami, melainkan dibentuk melalui keputusan politik, investasi kebijakan, dan narasi budaya yang berkelanjutan.

Kasus serupa juga terlihat di *Houtong Cat Village*, Taiwan, yang sering dijadikan rujukan akademik dalam kajian *community based tourism* dan regenerasi kawasan pasca-industri. Houtong merupakan bekas desa tambang yang mengalami kemunduran ekonomi, sebelum kemudian direvitalisasi melalui pariwisata berbasis kucing. Penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan Houtong tidak hanya terletak pada daya tarik kucing itu sendiri, tetapi pada keterlibatan komunitas lokal, dukungan pemerintah daerah, serta narasi pelestarian yang dikaitkan dengan ekonomi kreatif dan keberlanjutan sosial (Chen & Chang, 2018; Lin, 2019). Kucing di Houtong berfungsi sebagai *symbolic capital* yang memungkinkan transformasi kebijakan pembangunan wilayah dari ekstraktif menuju pariwisata berkelanjutan.

Dimensi simbolik kucing juga terlihat kuat dalam konteks warisan budaya global, seperti di kawasan Hagia Sophia, Istanbul, Turki. Kucing yang hidup di sekitar situs warisan dunia tersebut termasuk figur kucing yang kemudian menjadi ikon wisata menunjukkan bagaimana relasi manusia, hewan, dan ruang sakral membentuk daya tarik wisata urban. Studi tentang *heritage tourism* dan *multispecies urbanism* mencatat bahwa kehadiran hewan di ruang bersejarah tidak hanya meningkatkan pengalaman wisatawan, tetapi juga memperkuat narasi toleransi, keberlanjutan, dan inklusivitas dalam tata kelola kota (Buller, 2016; Porter et al., 2020). Fenomena ini menegaskan bahwa kucing dapat menjadi aktor non-manusia yang berperan dalam pembentukan makna politik dan budaya suatu ruang.

Dalam konteks Indonesia, Kucing Busok di Pulau Raas, Kabupaten Sumenep, Madura, menghadirkan dinamika yang sebanding, namun dengan karakteristik lokal yang khas. Sebagai satu-satunya ras kucing endemik Indonesia yang memperoleh pengakuan internasional dari *World Cat Federation* pada 2022, Kucing Busok memiliki nilai biologis sekaligus simbolik yang tinggi. Upaya pelestarian Kucing Busok tidak dapat dilepaskan dari peran aktif Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam membangun legitimasi kebijakan konservasi melalui agenda promosi dan edukasi publik. Penyelenggaraan Indonesia *Bred and Raas Catshow* pada 14 April 2018 yang terintegrasi dengan program Visit Sumenep menjadi contoh konkret bagaimana konservasi satwa endemik dimobilisasi sebagai instrumen kebijakan kultural dan pariwisata daerah.

Dari perspektif politik lokal, agenda tersebut menunjukkan bahwa pelestarian Kucing Busok tidak hanya dipahami sebagai kewajiban ekologis, tetapi juga sebagai investasi simbolik yang memperkuat identitas daerah dan daya saing pariwisata. Pernyataan Bupati Sumenep pada momentum tersebut menegaskan bahwa keberhasilan konservasi tidak dapat bertumpu pada regulasi formal semata, melainkan membutuhkan sinergi antara pemerintah, masyarakat lokal, dan komunitas pecinta hewan. Sinergi ini mencerminkan prinsip *collaborative governance* yang dalam literatur kebijakan publik dipandang sebagai prasyarat keberlanjutan kebijakan konservasi (Ansell & Gash, 2008). Lebih jauh, pelestarian Kucing Busok juga diperkuat oleh norma sosial dan kepercayaan lokal masyarakat Pulau Raas, seperti larangan membawa kucing keluar pulau tanpa prosedur tertentu dan mitos tentang kesialan bagi pelanggar. Dalam kajian antropologi politik, mekanisme sosial semacam ini dipahami sebagai bentuk *informal institutions* yang berperan penting dalam menopang kebijakan formal negara (Helmke & Levitsky, 2004). Dengan demikian, konservasi Kucing Busok berlangsung dalam irisan antara kebijakan negara, norma adat, dan simbolisme budaya.

Meskipun berbagai studi telah membahas konservasi satwa, pariwisata berbasis komunitas, dan *place branding*, kajian yang secara eksplisit menempatkan fauna endemik sebagai modal politik lokal masih relatif terbatas, khususnya dalam konteks Indonesia. Penelitian yang mengintegrasikan praktik konservasi, simbolisme budaya, dan strategi politik lokal dalam satu kerangka analisis masih jarang ditemukan. Oleh

karena itu, penelitian ini mengajukan pertanyaan utama: bagaimana Kucing Busok berfungsi sebagai modal politik lokal dalam konteks konservasi, tata kelola pemerintahan, dan pengembangan pariwisata berkelanjutan di Pulau Raas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kucing Busok sebagai aset strategis yang tidak hanya memiliki nilai ekologis, tetapi juga nilai politik, sosial, dan kultural dalam pembangunan daerah. Dengan mengaitkan pengalaman Pulau Raas dengan praktik internasional di Kuching (Malaysia), Houtong (Taiwan), dan Istanbul (Turki), studi ini diharapkan dapat memperkaya literatur tentang politik lokal, konservasi berbasis komunitas, dan pariwisata berkelanjutan berbasis identitas fauna.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian konseptual-analitis, berbasis data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka (*library research*). Topologi data bersifat kualitatif-konseptual, yang memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap konstruksi makna, relasi kekuasaan, dan kerangka institusional di balik pelestarian fauna endemik. Sumber data dalam penelitian ini meliputi: Literatur akademik yaitu Artikel jurnal nasional dan internasional bereputasi yang membahas politik lokal, *local political capital*, *symbolic capital*, *political ecology*, *animal-based tourism*, *place branding*, dan *collaborative governance*. Buku ilmiah dan monograf yaitu Karya-karya teoritik yang relevan dengan legitimasi politik, tata kelola pemerintahan, ekonomi politik pariwisata, serta konservasi berbasis komunitas. Dokumen kebijakan dan laporan institusional yaitu dokumen pemerintah daerah, laporan lembaga riset, serta publikasi organisasi yang berkaitan dengan pelestarian dan pengakuan Kucing Busok, Sumber media kredibel yaitu Artikel media arus utama digunakan secara selektif sebagai data pendukung untuk memperkaya konteks empiris, khususnya terkait sejarah, narasi publik, dan dinamika pengakuan internasional Kucing Busok, dan pemilihan data sekunder ini didasarkan pada tujuan penelitian yang bersifat analitis dan teoritis, yaitu untuk menelaah bagaimana Kucing Busok dikonstruksikan sebagai modal politik lokal dalam relasi antara konservasi, tata kelola pemerintahan, dan pariwisata berkelanjutan, tanpa melakukan pengumpulan data lapangan secara langsung (Jessop, 2016; Creswell, 2018).

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara sistematis, dengan tahapan berikut; Identifikasi kata kunci yaitu kata kunci utama meliputi: *local political capital*, *symbolic capital*, *endemic fauna*, *animal-based tourism*, *place branding*, *governance*, *community-based conservation*, serta *Kucing Busok/Raas cat*, Seleksi sumber yaitu literatur dipilih berdasarkan kriteria relevansi tematik, kredibilitas akademik, dan kontribusi teoritis. Prioritas diberikan pada jurnal bereputasi dan penerbit akademik internasional (Fennell, 2015; Kavartzis & Ashworth, 2017), dan Klasifikasi data Data yang terkumpul diklasifikasikan ke dalam klaster tematik berupa fauna endemik dan simbolisme politik, *governance* formal dan institusi informal, pariwisata berbasis satwa dan ekonomi politik lokal, studi komparatif internasional terkait kucing sebagai simbol wilayah.

Prosedur ini memungkinkan penyusunan kerangka analisis yang sistematis serta perbandingan lintas konteks antara Pulau Raas dan praktik internasional (Bramwell & Lane, 2011), dan Teknik Analisis Data Analisis data dilakukan melalui pendekatan deskriptif-analitis dan interpretatif, dengan tahapan sebagai berikut; Analisis tematik (*thematic analysis*), Literatur dianalisis untuk mengidentifikasi tema-tema utama terkait peran fauna endemik sebagai modal politik lokal, termasuk legitimasi kebijakan, simbolisme budaya, dan relasi kekuasaan (Bourdieu, 1986; Robbins, 2020), Analisis konseptual dan komparatif yaitu konsep-konsep kunci seperti *symbolic capital*, *collaborative governance*, dan *place branding* digunakan sebagai perangkat analisis untuk membaca kasus Kucing Busok, serta dibandingkan dengan studi kasus internasional seperti Kuching (Malaysia), Houtong (Taiwan), dan pulau-pulau kucing di Jepang (Hankinson, 2015; Chen & Chang, 2018), dan Sintesis analitis yaitu temuan dianalisis secara integratif untuk menjelaskan bagaimana konservasi Kucing Busok berfungsi tidak hanya sebagai praktik ekologis, tetapi juga sebagai instrumen legitimasi politik lokal dan strategi pembangunan pariwisata berkelanjutan.

Pendekatan ini dipilih karena relevan untuk mengkaji fenomena politik simbolik dan konstruksi makna, yang tidak dapat diukur secara kuantitatif, namun membutuhkan interpretasi mendalam terhadap narasi dan relasi sosial (Creswell & Poth, 2018). Visualisasi dan Penyajian Data yaitu visualisasi data disajikan dalam bentuk diagram konseptual dan skema analitis, bukan statistik kuantitatif. Visualisasi digunakan untuk

memetakan relasi konseptual antara fauna endemik, simbolisme budaya, legitimasi kebijakan, *governance*, dan pasar pariwisata global, menjelaskan alur logis analisis dan posisi Kucing Busok sebagai penghubung antara konservasi, identitas lokal, dan pariwisata berkelanjutan, meningkatkan kejelasan argumentasi teoretis dan transparansi metodologis, Pendekatan visual semacam ini lazim digunakan dalam penelitian kualitatif-konseptual untuk memperkuat koherensi analisis (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014), dan validitas dan reliabilitas yaitu validitas penelitian dijaga melalui triangulasi sumber literatur, dengan membandingkan perspektif akademik, kebijakan, dan laporan empiris dari berbagai konteks. Reliabilitas dicapai melalui konsistensi penggunaan kerangka teoritis dan prosedur analisis terhadap seluruh sumber data. Dengan pendekatan kualitatif-konseptual ini, temuan penelitian bersifat *analytically generalizable*, sehingga dapat dievaluasi dan digunakan sebagai rujukan konseptual dalam penelitian lain yang mengkaji relasi antara fauna endemik, politik lokal, dan pariwisata berbasis simbol (Yin, 2018).

3. HASIL

Bagian ini menyajikan dan membahas temuan penelitian berdasarkan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan teknik analisis dokumen kebijakan, studi pustaka, serta penelusuran narasi lokal mengenai Kucing Busok di Pulau Raas. Analisis dilakukan menggunakan kerangka teoritis *political capital*, *multi-level governance*, dan *political ecology* untuk memahami posisi Kucing Busok dalam relasi antara konservasi, tata kelola pariwisata, dan kebijakan daerah.

3.1. Kucing Busok sebagai Modal Simbolik dan Political Capital Lokal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kucing Busok memiliki posisi strategis sebagai simbol identitas lokal yang hidup dalam praktik sosial dan representasi kultural masyarakat Pulau Raas. Keberadaan Kucing Busok tidak hanya dimaknai sebagai fauna endemik, tetapi juga sebagai simbol keterikatan masyarakat terhadap ruang hidup kepulauan dan sejarah lokal. Dalam kerangka *political capital*, simbolisme tersebut merepresentasikan modal simbolik yang berpotensi dikonversi menjadi modal politik institusional apabila dilembagakan melalui kebijakan publik (Bourdieu, 1986). Namun demikian, temuan penelitian menunjukkan bahwa hingga saat ini modal simbolik Kucing Busok belum terinstitusionalisasi dalam regulasi daerah. Belum terdapat Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep yang secara eksplisit mengatur perlindungan, pengelolaan, maupun pemanfaatan satwa endemik lokal. Akibatnya, Kucing Busok masih berada dalam ranah pengakuan sosial, tanpa jaminan perlindungan hukum yang mengikat.

3.2. Kerangka Hukum Nasional Konservasi dan Implikasinya bagi Daerah

Dalam konteks regulasi nasional terbaru, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 yang menggantikan dan memperbarui UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya memberikan kerangka hukum baru yang lebih komprehensif. UU ini memperluas tanggung jawab konservasi tidak hanya pada pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah, termasuk dalam perlindungan satwa endemik berbasis karakteristik lokal. Secara normatif, keberlakuan UU ini membuka ruang hukum yang kuat bagi Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk menyusun perda turunan mengenai konservasi satwa endemik seperti Kucing Busok. Namun, penelitian ini menemukan bahwa peluang tersebut belum dimanfaatkan secara optimal, sehingga terjadi kesenjangan antara mandat nasional dan implementasi kebijakan daerah.

3.3. Tata Kelola Pariwisata dan Ketiadaan Integrasi Konservasi Satwa

Analisis terhadap Perda Kabupaten Sumenep Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA) menunjukkan bahwa kebijakan pariwisata daerah masih berorientasi pada pengembangan destinasi fisik dan budaya material. Fauna endemik, termasuk Kucing Busok, belum diposisikan sebagai elemen strategis dalam perencanaan pariwisata. Pendekatan ini mencerminkan paradigma *destination based tourism*, di mana pariwisata dipahami sebagai pengelolaan ruang dan objek, bukan sebagai sistem sosial ekologis yang terintegrasi. Dalam perspektif pariwisata berkelanjutan, satwa endemik seharusnya dapat berfungsi sebagai *flagship species* yang menghubungkan kepentingan konservasi dengan pembangunan ekonomi lokal (Bramwell & Lane, 2011). Ketidakhadiran Kucing Busok dalam RIPPARDA menandakan lemahnya integrasi antara kebijakan pariwisata dan konservasi di tingkat daerah.

3.4. Fragmentasi Kebijakan Wilayah Kepulauan

Temuan selanjutnya berkaitan dengan Perda Kabupaten Sumenep Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Perda ini menekankan prinsip keberlanjutan lingkungan, namun fokus utamanya berada pada sumber daya kelautan dan pesisir. Fauna darat endemik di pulau-pulau kecil, seperti Kucing Busok, tidak termasuk dalam rezim pengelolaan tersebut. Dalam kerangka *multi level governance*, kondisi ini menunjukkan adanya fragmentasi sektoral dan lemahnya koordinasi kebijakan antar sektor lingkungan, pariwisata, dan pembangunan wilayah (Pierre & Peters, 2020). Sementara dalam perspektif *political ecology*, fragmentasi ini mencerminkan relasi kuasa yang memprioritaskan sumber daya dengan nilai ekonomi langsung, sehingga konservasi satwa lokal cenderung terpinggirkan (Robbins, 2012).

3.5. Peluang Desa Wisata dan Keterlibatan CSR

Pengesahan Perda Kabupaten Sumenep Nomor 1 Tahun 2025 tentang Desa Wisata membuka peluang baru bagi pengarusutamaan identitas lokal dalam tata kelola pariwisata berbasis komunitas. Namun, penelitian ini menemukan bahwa Kucing Busok belum secara eksplisit diintegrasikan sebagai komponen daya tarik desa wisata di wilayah kepulauan Raas. Padahal, dalam pendekatan *community based tourism*, simbol dan sumber daya lokal merupakan fondasi utama pariwisata berkelanjutan (Goodwin & Santilli, 2009). Di sisi lain, kewajiban *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan telah diatur melalui UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan PP Nomor 47 Tahun 2012, namun regulasi tersebut masih bersifat umum. Penelitian ini menemukan bahwa belum terdapat Perda CSR di Kabupaten Sumenep yang secara spesifik mengarahkan dana CSR untuk konservasi satwa endemik dan pariwisata berkelanjutan.

Ketiadaan Perda CSR menyebabkan perusahaan cenderung berhati-hati dalam menyalurkan dana CSR. Dengan adanya Perda CSR yang diturunkan dari UU nasional, perusahaan akan memiliki kepastian hukum bahwa dana CSR yang disalurkan memiliki payung hukum yang jelas, aman, dan akuntabel. Hal ini berpotensi memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat dalam konservasi Kucing Busok.

Table 1. Pemetaan Regulasi dan Dampaknya terhadap Kucing Busok

Bidang	Peraturan/UU	Status	Dampak
Konservasi Hayati & Satwa	SDA UU No. 32 Tahun 2024	Berlaku & menggantikan UU 5/1990	Memberikan kerangka hukum baru dan memperluas tanggung jawab konservasi kepada pemerintah daerah
CSR Perusahaan	UU No. 40 Tahun 2007 & PP No. 47 Tahun 2012	Masih berlaku	Mengatur kewajiban CSR, tetapi memerlukan perda CSR yang secara spesifik mengatur alokasi, mekanisme, dan pengelolaan dana bagi program konservasi dan pelestarian Kucing Busok secara berkelanjutan
Tata Kelola Pariwisata	Perda Kab. Sumenep No. 4 Tahun 2018 (RIPPARDA)	Berlaku	Fauna endemik tidak disebutkan sebagai elemen strategis
Wilayah Kepulauan	Perda Kab. Sumenep No. 8 Tahun 2013	Berlaku	Fokus pesisir & laut, fauna darat endemik tidak termasuk
Desa Wisata	Perda Kab. Sumenep No. 1 Tahun 2025	Berlaku	Berpotensi mengakomodasi Kucing Busok, tetapi belum diatur

4. PEMBAHASAN

4.1. Fauna Endemik sebagai Modal Politik dan Simbol Legitimasi Pemerintahan Lokal

Dalam kajian ilmu politik kontemporer, konsep modal politik mengalami perluasan makna yang signifikan. Modal politik tidak lagi dipahami semata sebagai sumber daya elektoral atau kekuatan institusional formal, melainkan sebagai akumulasi legitimasi simbolik, identitas kolektif, dan pengakuan sosial yang memungkinkan aktor politik memperoleh penerimaan publik terhadap kebijakan yang diusung (Bourdieu, 1986; Jessop, 2016). Dalam kerangka ini, simbol-simbol kultural termasuk *fauna endemic* dapat berfungsi sebagai *political resources* yang efektif dalam membangun otoritas dan legitimasi pemerintahan lokal. Literatur tentang *political ecology* dan *environmental governance* menunjukkan bahwa konservasi satwa tidak pernah bersifat netral secara politik. Upaya pelestarian selalu melibatkan relasi kuasa antara negara, masyarakat lokal, dan aktor non-negara, serta dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi dan simbolik (Bryant, 2015; Robbins, 2020).

Satwa endemik, khususnya, sering dikonstruksikan sebagai representasi identitas wilayah yang dapat dimobilisasi dalam diskursus kebijakan publik, baik untuk kepentingan konservasi maupun pembangunan ekonomi berbasis pariwisata. Dalam konteks pemerintahan daerah, fauna simbolik dapat berfungsi sebagai *symbolic capital* yang memperkuat legitimasi kebijakan lokal. Studi-studi tentang desentralisasi dan politik lokal menunjukkan bahwa pemerintah daerah cenderung memanfaatkan simbol lokal untuk membedakan diri dalam kompetisi antarwilayah, sekaligus membangun kedekatan emosional dengan masyarakat (Hadiz, 2010; Aspinall & Sukmajati, 2016). Namun, sebagian besar kajian masih menempatkan simbol budaya dalam bentuk artefak, ritual, atau identitas etnis, sementara fauna endemik relatif jarang dianalisis sebagai modal politik yang strategis.

4.2. Pariwisata Berbasis Satwa, Pasar Wisata Global, dan Ekonomi Politik Lokal

Literatur pariwisata berkelanjutan menegaskan bahwa pariwisata berbasis satwa (*animal-based tourism*) telah berkembang menjadi segmen penting dalam pasar wisata global, khususnya seiring meningkatnya minat wisatawan terhadap pengalaman autentik, etis, dan berbasis konservasi (Fennell, 2015; Newsome, Moore, & Dowling, 2013). Dalam konteks ini, satwa tidak hanya berfungsi sebagai daya tarik wisata, tetapi juga sebagai komoditas simbolik yang diproduksi dan direproduksi melalui kebijakan, narasi, dan praktik sosial. Pendekatan ekonomi politik dalam pariwisata menunjukkan bahwa pengelolaan wisata berbasis satwa selalu melibatkan negosiasi antara kepentingan konservasi dan komersialisasi.

Beberapa studi mengkritik kecenderungan *greenwashing* dalam pariwisata satwa, di mana narasi konservasi digunakan untuk melegitimasi eksploitasi ekonomi (Büscher & Fletcher, 2019). Namun, penelitian lain menekankan bahwa dengan tata kelola yang inklusif dan berbasis komunitas, pariwisata satwa justru dapat memperkuat kesejahteraan lokal sekaligus konservasi jangka panjang (Scheyvens, 1999; Stone & Nyaupane, 2018). Dalam kerangka *place branding*, fauna simbolik sering digunakan sebagai penanda identitas destinasi yang membedakan suatu wilayah di pasar wisata global. Kavaratzis dan Ashworth (2017) menegaskan bahwa keberhasilan *place branding* tidak hanya bergantung pada strategi pemasaran, tetapi pada konsistensi antara simbol yang dipromosikan, kebijakan publik, dan praktik sosial masyarakat lokal. Oleh karena itu, fauna ras atau satwa ikonik dapat berfungsi sebagai titik temu antara ekonomi politik pariwisata dan pembentukan legitimasi kebijakan lokal.

4.3. Pengalaman Internasional: Kucing sebagai Modal Simbolik dan Instrumen Kebijakan

Sejumlah studi internasional menunjukkan bahwa kucing sebagai fauna yang dekat dengan kehidupan manusia memiliki potensi simbolik yang kuat dalam pembangunan wilayah. Di Kota Kuching, Malaysia, kucing dikonstruksikan secara sistematis sebagai simbol kota melalui kebijakan tata ruang, museum tematik, ikon visual, dan narasi pariwisata resmi. Penelitian tentang urban branding menunjukkan bahwa strategi ini tidak bersifat spontan, melainkan hasil dari keputusan politik dan investasi kebijakan jangka panjang yang berhasil memperkuat citra kota dan kohesi sosial (Hankinson, 2015). Kasus *Houtong Cat Village* di Taiwan memberikan contoh bagaimana kucing berfungsi sebagai *symbolic capital* dalam regenerasi kawasan pasca-industri.

Studi Chen dan Chang (2018) serta Lin (2019) menunjukkan bahwa keberhasilan Houtong tidak hanya ditentukan oleh keberadaan kucing, tetapi oleh integrasi antara partisipasi komunitas, dukungan pemerintah lokal, dan narasi konservasi yang dikaitkan dengan ekonomi kreatif. Dalam konteks ini, kucing menjadi medium transisi kebijakan dari pembangunan ekstraktif menuju pariwisata berkelanjutan berbasis komunitas. Dimensi simbolik fauna juga tampak dalam kajian multispecies urbanism, seperti pada studi tentang kucing di kawasan Hagia Sophia, Istanbul. Porter et al. (2020) menunjukkan bahwa kehadiran kucing di ruang warisan dunia berkontribusi pada pembentukan makna sosial dan politik ruang kota, sekaligus memperkuat citra kota sebagai ruang yang inklusif dan berkelanjutan. Studi-studi ini memperluas pemahaman tentang hewan sebagai aktor non-manusia yang berperan dalam tata kelola, pariwisata, dan produksi makna politik.

4.4. Governance, Norma Sosial, dan Institusi Informal dalam Konservasi Satwa

Literatur governance menekankan bahwa keberhasilan kebijakan konservasi sangat bergantung pada kolaborasi antara negara, masyarakat lokal, dan aktor non-negara (*collaborative governance*) (Ansell & Gash, 2008). Dalam banyak kasus, regulasi formal tidak cukup efektif tanpa dukungan norma sosial dan institusi informal yang hidup dalam masyarakat. Helmke dan Levitsky (2004) menunjukkan bahwa institusi informal dapat memperkuat, melengkapi, atau bahkan menggantikan institusi formal dalam konteks tertentu. Dalam studi konservasi berbasis komunitas, norma adat, mitos, dan kepercayaan lokal sering berfungsi sebagai mekanisme pengendalian yang efektif terhadap eksploitasi sumber daya alam (Berkes, 2018). Meskipun sering dipandang irasional dari perspektif kebijakan modern, mekanisme ini justru berperan penting dalam menjaga keberlanjutan ekologis, terutama di wilayah kepulauan dan komunitas adat. Namun, kajian yang mengaitkan norma sosial tersebut dengan pembentukan legitimasi politik lokal masih relatif terbatas.

4.5. Kesenjangan Literatur dan Posisi Penelitian

Kajian mengenai konservasi satwa dan pariwisata berkelanjutan telah berkembang pesat dalam dua dekade terakhir, khususnya melalui pendekatan *community-based conservation* dan *place branding*. Sejumlah studi menekankan pentingnya keterlibatan komunitas lokal dalam menjaga keberlanjutan sumber daya hayati sekaligus mendorong manfaat ekonomi melalui sektor pariwisata (Bramwell & Lane, 2011; Giampiccoli & Saayman, 2018). Namun demikian, sebagian besar literatur tersebut masih memposisikan fauna sebagai objek ekologi atau komoditas wisata, bukan sebagai aktor simbolik dalam arena politik lokal. Dalam konteks politik lokal, studi tentang *political capital* dan legitimasi kebijakan lebih sering difokuskan pada elite politik, institusi formal, atau identitas etnis dan budaya (Pierre & Peters, 2020; Hadiz, 2016). Fauna endemik jarang diperlakukan sebagai sumber daya politik simbolik yang dapat dimobilisasi untuk membangun konsensus, memperkuat legitimasi kebijakan, atau membentuk identitas wilayah. Akibatnya, relasi antara konservasi fauna, kekuasaan lokal, dan proses pengambilan kebijakan masih terfragmentasi dalam literatur.

Penelitian mengenai kucing dalam konteks pariwisata dan *urban branding* memang telah dilakukan di beberapa destinasi internasional, seperti Kuching di Malaysia, Istanbul di Turki, dan Tashirojima di Jepang. Studi-studi tersebut menunjukkan bahwa kucing dapat berfungsi sebagai ikon kota, daya tarik wisata, dan simbol toleransi sosial (Henderson, 2019; Choi & Kim, 2021). Namun, fokus penelitian cenderung berada pada wilayah perkotaan atau destinasi global dengan infrastruktur pariwisata mapan, sehingga mengabaikan konteks pulau kecil dengan tata kelola terbatas dan dinamika politik lokal yang lebih kompleks. Di Indonesia, kajian tentang fauna endemik umumnya bergerak dalam ranah biologi konservasi dan kebijakan lingkungan, sementara analisis politik lokal dan legitimasi kebijakan berjalan secara terpisah (Santosa et al., 2017; Armitage et al., 2020). Minimnya pendekatan interdisipliner menyebabkan kurangnya pemahaman tentang bagaimana fauna endemik dapat dimanfaatkan sebagai modal politik lokal yang menghubungkan konservasi, *governance*, dan pembangunan pariwisata berkelanjutan. Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini memosisikan Kucing Busok Pulau Raas sebagai unit analisis utama untuk mengintegrasikan perspektif ekonomi politik, *governance hybrid* (formal dan informal), simbolisme fauna, serta dinamika pasar wisata global. Dengan menempatkan fauna ras endemik sebagai aset strategis dalam pembentukan legitimasi kebijakan dan identitas daerah, studi ini tidak hanya mengisi kekosongan empiris dalam konteks pulau kecil

di Indonesia, tetapi juga memperluas kerangka teoretis dalam literatur politik lokal dan pariwisata berkelanjutan.

4.6. Pulau Kucing Jepang dalam Perspektif Modal Simbolik dan Ekonomi Politik Pariwisata

Pengalaman internasional terkait fauna simbolik sebagai aset politik dan ekonomi dapat ditemukan secara menonjol pada fenomena cat island di Jepang, khususnya Tashirojima (Prefektur Miyagi) dan Aoshima (Prefektur Ehime). Kedua pulau ini sering dikonstruksikan dalam literatur pariwisata sebagai destinasi unik berbasis kehadiran kucing dalam jumlah besar, yang hidup berdampingan dengan komunitas nelayan dan lanskap kepulauan yang terdepopulasi. Secara historis, populasi kucing di Tashirojima dan Aoshima berkembang sejak era industri ulat sutra, ketika kucing dipelihara untuk mengendalikan hama tikus yang mengancam produksi kokon. Seiring menurunnya aktivitas industri tersebut, kucing tetap dipertahankan dan kemudian mengalami rekontekstualisasi makna sebagai simbol keberuntungan dan pelindung komunitas pesisir (Manzenreiter, 2017).

Dalam perspektif ekonomi politik pariwisata, pulau-pulau kucing di Jepang menunjukkan bagaimana fauna non-endemik sebagian besar kucing ras campuran seperti calico (belang tiga) dan tabby dapat direproduksi sebagai komoditas simbolik melalui narasi budaya, ritual lokal (misalnya kuil kucing di Tashirojima), serta representasi visual dalam media dan industri kreatif. Studi-studi pariwisata Jepang menegaskan bahwa popularitas Tashirojima dan Aoshima tidak didasarkan pada kekhasan biologis ras kucing, melainkan pada kepadatan populasi kucing, pengalaman afektif wisatawan, dan narasi romantisasi kehidupan pulau terpencil (Shen, 2024). Namun demikian, literatur kritis mencatat bahwa model pariwisata tersebut bersifat rentan secara struktural, karena sangat bergantung pada eksposur media, arus wisata musiman, dan infrastruktur transportasi terbatas seperti feri dari Pelabuhan Nagahama. Selain itu, tidak adanya kerangka konservasi formal terhadap kucing yang bukan satwa endemik dan tidak dilindungi secara biologis membuat tata kelola pariwisata di pulau-pulau tersebut lebih bersifat *ad hoc* dan simbolik daripada berbasis kebijakan jangka panjang (Mostafanezhad, 2019).

Dalam konteks ini, posisi Kucing Busok Pulau Raas menunjukkan perbedaan konseptual yang signifikan. Berbeda dengan Tashirojima dan Aoshima, Kucing Busok memiliki karakteristik sebagai fauna ras endemik lokal yang melekat pada identitas geografis dan kultural Pulau Raas. Hal ini memberikan potensi modal politik yang lebih kuat, karena kucing tidak hanya berfungsi sebagai atraksi wisata, tetapi juga sebagai simbol otentik yang dapat dilegitimasi melalui kebijakan konservasi, regulasi daerah, dan narasi identitas lokal. Dengan demikian, Pulau Raas berpotensi melampaui model cat island Jepang yang berbasis popularitas kuantitatif, menuju model pariwisata-politik berbasis keunggulan simbolik dan biologis. Perbandingan ini memperkuat argumen bahwa fauna endemik seperti Kucing Busok memiliki nilai strategis yang lebih berkelanjutan sebagai modal politik lokal dibandingkan fauna non-endemik yang direproduksi semata melalui narasi wisata. Dalam kerangka *governance* dan legitimasi kebijakan, status endemik memungkinkan integrasi yang lebih kuat antara konservasi, pariwisata berkelanjutan, dan pembentukan identitas daerah, khususnya di wilayah kepulauan dengan dinamika politik lokal yang khas.

Table 2. Fokus dan Kebaruan Penelitian

Aspek	Gap Penelitian	Kontribusi Penelitian
Fauna Endemik & Politik Lokal	Banyak studi tentang simbol fauna fokus pada megafauna atau hewan besar atau urban; studi endemik kecil di kepulauan kurang.	Menempatkan Kucing Busok sebagai local political capital yang menghubungkan konservasi, <i>governance</i> , dan pariwisata.
<i>Governance Hybrid</i> (Formal + Adat)	<i>Governance</i> dalam konservasi sering hanya dibahas dari perspektif formal atau komunitas.	Menggabungkan tata kelola formal dan norma sosial atau mitos lokal sebagai mekanisme konservasi efektif.
<i>Animal-based Tourism</i> & <i>Place Branding</i>	Studi tentang pariwisata berbasis fauna cenderung terpisah dari politik lokal.	Menunjukkan hubungan langsung antara simbol fauna legitimasi politik strategi tempat dalam konteks global tourism.

Aspek	Gap Penelitian	Kontribusi Penelitian
Komparasi Internasional	Studi kasus internasional relatif sporadis dan tidak terintegrasi dalam satu kerangka teoretis politik.	Memadukan kasus Tashirojima & Aoshima (Jepang) dengan konteks Kucing Busok (Indonesia) untuk memperkaya literatur global.

4.7. Penelitian Ilmiah terhadap Kucing Busok

Penelitian ilmiah awal mengenai kucing Busok sebagai ras kucing endemik Indonesia telah dilakukan oleh akademisi nasional. Salah satu institusi yang berperan penting adalah Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada (UGM). Berdasarkan laporan Kompas.com, peneliti UGM, seperti drh. Slamet Raharjo, menyatakan bahwa sejak tahun 2008 telah dilakukan upaya penelitian untuk mengenali dan mendokumentasikan kucing Busok sebagai ras khas Indonesia melalui kajian karakteristik morfologi serta penelusuran asal-usulnya sebagai *natural breed* yang berkembang secara lokal di Pulau Raas (Kompas.com, 2022). Penelitian ini menjadi fondasi awal dalam mengangkat kucing Busok dari pengetahuan lokal menuju pengakuan ilmiah dan konservasi berbasis sains. Selanjutnya, penelitian yang lebih teknis dan mendalam dilakukan oleh peneliti biologi Ronny Rachman Noor melalui kajian fenotipe dan genotipe kucing Busok. Hasil penelitian tersebut dipublikasikan melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IPB University. Studi ini menunjukkan bahwa kucing Busok tergolong dalam kelompok kucing Asia yang berkembang secara alami dengan karakter genetika khas akibat isolasi geografis Pulau Raas. Meskipun memiliki tingkat variasi genetika yang relatif tinggi, populasi kucing Busok tergolong langka dan berkembang secara terisolasi, sehingga memerlukan perhatian khusus dalam upaya konservasi dan pengelolaan keberlanjutan ras (Noor, 2014; Kumparan, 2022).

4.8. Aktor dan Peran dalam Pelestarian Kucing Busok

Pelestarian fauna endemik merupakan proses sosial-politik yang melibatkan berbagai aktor dengan motif dan kapasitas yang berbeda. Dalam studi konservasi modern, pelestarian satwa tidak lagi dipahami semata-mata sebagai upaya ekologis, tetapi juga sebagai arena interaksi politik, sosial, dan ekonomi, di mana legitimasi kebijakan publik dapat dibentuk melalui narasi identitas dan pembangunan wilayah (Bramwell & Lane, 2011; Pierre & Peters, 2020). Pendekatan ini relevan untuk memahami pelestarian Kucing Busok (*Raas cat*) sebagai fenomena yang tidak hanya bersifat biologis, tetapi juga merepresentasikan dinamika politik lokal. Kucing Busok merupakan ras kucing endemik Pulau Raas, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, yang berkembang secara alami tanpa intervensi pemuliaan buatan dan relatif terisolasi secara genetik. Isolasi tersebut diperkuat oleh praktik sosial masyarakat setempat, seperti norma tidak membawa keluar kucing Busok yang belum disterilisasi, guna menjaga kemurnian ras. Berdasarkan pengamatan komunitas dan catatan historis, populasi Kucing Busok dengan gen murni diperkirakan kurang dari 100 ekor pada sekitar tahun 2016, yang menunjukkan statusnya sebagai satwa langka dan rentan sehingga memerlukan perhatian konservasi khusus (Kompas.com, 2022; The Jakarta Post, 2022).

Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep berperan sebagai aktor formal utama dalam pelestarian Kucing Busok melalui kebijakan publik dan agenda pembangunan daerah. Peran tersebut diwujudkan antara lain melalui penyelenggaraan kontes kucing berskala nasional dan internasional serta wacana pembangunan kawasan konservasi satwa khas daerah. Upaya ini menunjukkan bagaimana otoritas lokal berusaha mengintegrasikan kepentingan konservasi dengan strategi pengembangan pariwisata dan penguatan identitas wilayah, yang pada akhirnya membangun legitimasi politik berbasis simbol lokal (Bramwell & Lane, 2011). Selain aktor negara, organisasi non-negara seperti *Cat Fancy Indonesia* (CFI) dan *Indonesian Busok Raas Association* (IBRA) memainkan peran penting dalam dokumentasi standar ras, promosi budaya, serta jejaring dengan komunitas global pecinta kucing. Keterlibatan asosiasi semacam ini berkontribusi pada pembentukan nilai simbolik Kucing Busok sebagai fauna langka yang memiliki daya tarik budaya dan ekonomi. Literatur tentang *animal-based tourism* menunjukkan bahwa asosiasi ras dan komunitas pecinta satwa memiliki peran strategis dalam membangun persepsi publik terhadap fauna, yang dapat dikonversi menjadi modal simbolik dan ekonomi dalam konteks pariwisata berkelanjutan (Fennell, 2020; Newsome, Dowling, & Moore, 2013).

Di tingkat lokal, masyarakat Pulau Raas berfungsi sebagai aktor kunci dalam pelestarian melalui praktik sosial dan norma adat yang menjaga keberlanjutan populasi Kucing Busok. Pendekatan berbasis komunitas ini sejalan dengan konsep *community-based conservation*, di mana nilai budaya, pengetahuan lokal, dan kepemilikan sosial terhadap sumber daya alam menjadi modal utama dalam menjaga keberlanjutan spesies endemik (Berkes, 2018). Namun demikian, kolaborasi dengan institusi ilmiah masih relatif terbatas, meskipun telah dilakukan beberapa inisiatif dokumentasi *fenotipe* dan *genotipe* bersama lembaga riset. Kondisi ini menunjukkan perlunya integrasi yang lebih kuat antara data ilmiah, kebijakan publik, dan praktik komunitas agar strategi pelestarian dapat berjalan secara lebih terukur dan efektif.

Secara keseluruhan, pelestarian Kucing Busok ke depan dapat dirancang melalui suatu skema yang melibatkan konfigurasi aktor formal (pemerintah), aktor non-formal (asosiasi dan komunitas), sektor swasta yang direpresentasikan oleh perusahaan, serta masyarakat lokal. Interaksi antaraktor tersebut berlangsung dalam relasi kekuasaan, simbolisme budaya, dan dinamika pembangunan ekonomi lokal. Keterlibatan sektor swasta khususnya Perusahaan terwujud terutama melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang diarahkan pada dukungan kegiatan konservasi, pemberdayaan masyarakat, penguatan destinasi wisata berbasis fauna endemik, serta promosi identitas lokal. Dalam kerangka CSR, kepentingan perusahaan bersifat sosial dan reputasional, yaitu membangun legitimasi sosial (*social license to operate*), memperkuat hubungan dengan komunitas lokal, serta mendukung agenda pembangunan berkelanjutan yang sejalan dengan nilai-nilai lingkungan dan sosial (Carroll, 1991; Porter & Kramer, 2011).

Melalui skema CSR tersebut, perusahaan tidak hanya berperan sebagai penyandang dana, tetapi juga sebagai mitra pembangunan yang berkontribusi dalam pembentukan narasi konservasi, penguatan tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*), serta integrasi isu keberlanjutan ke dalam kebijakan dan praktik pembangunan lokal (Ansell & Gash, 2008; Bebbington et al., 2014). Dalam konteks pulau kecil yang memiliki struktur sosial yang erat dan identitas lokal yang kuat, keterlibatan perusahaan melalui CSR berpotensi memperkuat posisi Kucing Busok sebagai simbol ekologis dan kultural sekaligus sebagai instrumen pengembangan pariwisata berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini memosisikan Kucing Busok tidak hanya sebagai objek konservasi biologis, tetapi sebagai arena politik simbolik yang mempertemukan *governance*, identitas lokal, pariwisata berkelanjutan, dan tanggung jawab sosial perusahaan.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Kucing Busok merupakan lebih dari sekadar fauna endemik Pulau Raas. Kucing Busok memiliki fungsi strategis sebagai modal politik lokal yang mampu menghubungkan kepentingan konservasi, penguatan identitas daerah, tata kelola pemerintahan, dan pengembangan pariwisata berkelanjutan. Temuan ini menegaskan bahwa fauna endemik dapat menjadi sumber legitimasi kebijakan dan simbol kolektif yang memperkuat posisi daerah dalam pembangunan berbasis keunggulan lokal. Dengan demikian, pelestarian Kucing Busok tidak hanya penting dari aspek ekologis, tetapi juga memiliki nilai sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang dapat mendukung pembangunan wilayah kepulauan secara berkelanjutan.

Untuk mendukung optimalisasi peran tersebut, diperlukan penguatan kebijakan yang mengintegrasikan konservasi, pariwisata, dan pemberdayaan masyarakat dalam satu kerangka tata kelola kolaboratif. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi empiris mengenai persepsi masyarakat, efektivitas kebijakan konservasi, serta potensi ekonomi Kucing Busok dalam pengembangan pariwisata berbasis fauna endemik. Selain itu, penelitian komparatif dengan daerah lain yang memanfaatkan fauna sebagai identitas wilayah dapat dilakukan guna memperkaya model pengelolaan konservasi dan pembangunan daerah berbasis modal simbolik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Armitage, D., Berkes, F., & Doubleday, N. (2020). *Adaptive co-management: Collaboration, learning, and multi-level governance*. UBC Press.

- Aspinall, E., & Sukmajati, M. (2016). *Electoral dynamics in Indonesia: Money politics, patronage and clientelism at the grassroots*. NUS Press.
- Bebbington, J., Unerman, J., & O'Dwyer, B. (2014). Sustainability accounting and accountability. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 27(2), 277–298. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-03-2013-1254>
- Berkes, F. (2018). *Sacred ecology* (4th ed.). Routledge.
- Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. In J. G. Richardson (Ed.), *Handbook of theory and research for the sociology of education* (pp. 241–258). Greenwood Press.
- Bramwell, B., & Lane, B. (2011). Critical research on the governance of tourism and sustainability. *Journal of Sustainable Tourism*, 19(4–5), 411–421. <https://doi.org/10.1080/09669582.2011.580586>
- Bryant, R. L. (Ed.). (2015). *The international handbook of political ecology*. Edward Elgar Publishing.
- Buller, H. (2016). Animal geographies III: Ethics. *Progress in Human Geography*, 40(3), 422–430. <https://doi.org/10.1177/0309132515580499>
- Büscher, B., & Fletcher, R. (2019). Towards convivial conservation. *Conservation & Society*, 17(3), 283–296. https://doi.org/10.4103/cs.cs_19_75
- Carroll, A. B. (1991). The pyramid of corporate social responsibility: Toward the moral management of organizational stakeholders. *Business Horizons*, 34(4), 39–48. [https://doi.org/10.1016/0007-6813\(91\)90005-G](https://doi.org/10.1016/0007-6813(91)90005-G)
- Chen, C. F., & Chang, Y. Y. (2018). Residents' perceptions of place identity and sustainable tourism development: Evidence from a cat village in Taiwan. *Tourism Management Perspectives*, 27, 1–9. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2018.04.001>
- Chen, Y. C., & Chang, C. H. (2018). Community-based tourism and post-industrial regeneration: The case of Houtong Cat Village. *Journal of Tourism and Cultural Change*, 16(4), 337–354. <https://doi.org/10.1080/14766825.2017.1412508>
- Choi, S., & Kim, H. (2021). Animal symbolism and destination branding: The case of cat-themed tourism. *Tourism Management Perspectives*, 38, 100813. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2021.100813>
- Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Sage Publications.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Fennell, D. A. (2015). *Ecotourism* (4th ed.). Routledge.
- Fennell, D. A. (2015). *Ethics in tourism* (2nd ed.). Routledge.
- Fennell, D. A. (2020). *Tourism ethics* (2nd ed.). Channel View Publications.
- Giampiccoli, A., & Saayman, M. (2018). Community-based tourism development model and sustainability. *African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure*, 7(4), 1–27.
- Goodwin, H., & Santilli, R. (2009). *Community-based tourism: A success?* ICRT Occasional Paper.
- Guiney, T. (2020). Depopulation, affective tourism, and animal symbolism in Japan's island peripheries. *Tourism Geographies*, 22(4), 712–730. <https://doi.org/10.1080/14616688.2019.1708442>
- Hadiz, V. R. (2010). *Localising power in post-authoritarian Indonesia*. Stanford University Press.
- Hadiz, V. R. (2016). *Islamic populism in Indonesia and the Middle East*. Cambridge University Press.
- Hankinson, G. (2015). Rethinking the place branding construct. *Journal of Place Management and Development*, 8(1), 14–31. <https://doi.org/10.1108/JPM-D-08-2014-0018>
- Helmke, G., & Levitsky, S. (2004). Informal institutions and comparative politics: A research agenda. *Perspectives on Politics*, 2(4), 725–740. <https://doi.org/10.1017/S1537592704040472>
- Henderson, J. C. (2019). Animal attractions, tourism and ethical consumption. *Tourism Recreation Research*, 44(2), 171–181. <https://doi.org/10.1080/02508281.2018.1554566>
- Japan National Tourism Organization. (n.d.). *Cat Island (Tashirojima)*. Travel Japan. <https://www.japan.travel/en/spot/1765/>
- Jessop, B. (2016). *The state: Past, present, future*. Polity Press.
- Kavaratzis, M., & Ashworth, G. J. (2017). Partners in coffeeshops, canals and commerce: Marketing the city of Amsterdam. *Cities*, 65, 85–92. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2017.02.002>

- Kavaratzis, M., & Ashworth, G. J. (2017). Place branding: Beyond a marketing perspective. *Journal of Place Management and Development*, 10(1), 3–6. <https://doi.org/10.1108/JPM-D-11-2016-0073>
- Kompas.com. (2022, November 10). Ramai soal kucing Busok, ras asli Indonesia yang diakui dunia. *Kompas.com*. <https://www.kompas.com/tren/read/2022/11/10/190000565/ramai-soal-kucing-busok-ras-asli-indonesia-yang-diakui-dunia-kucing-apa-itu>
- Kumparan. (2022). Kucing Busok asli Indonesia viral dan diakui dunia. *Kumparan*. https://kumparan.com/berita_viral/kucing-busok-asli-indonesia-viral-diakui-dunia-ras-apa-itu
- Lin, Y. H. (2019). Community participation and place attachment in animal-based tourism: The case of Houtong Cat Village. *Sustainability*, 11(6), 1799. <https://doi.org/10.3390/su11061799>
- Lin, Y. J. (2019). Creative tourism and community empowerment: A case study of Houtong Cat Village. *Tourism Planning & Development*, 16(2), 139–156. <https://doi.org/10.1080/21568316.2018.1501735>
- Manzenreiter, W. (2017). Tourism and depopulation in rural Japan. *Contemporary Japan*, 29(1), 21–41. <https://doi.org/10.1080/18692729.2017.1259971>
- Markwell, K. (Ed.). (2015). *Animals and tourism: Understanding diverse relationships*. Channel View Publications.
- Matović, S., Lović Obradović, S., & Gajić, T. (2025). Sustainable tourism governance in protected areas. *Sustainability*, 17(15), 7048. <https://doi.org/10.3390/su17157048>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Mostafanezhad, M. (2019). The anthropocenic imaginary: Political ecologies of tourism. *Tourism Geographies*, 21(3), 389–404. <https://doi.org/10.1080/14616688.2018.1544252>
- Newsome, D., Dowling, R., & Moore, S. A. (2013). *Wildlife tourism*. Channel View Publications.
- Newsome, D., Moore, S. A., & Dowling, R. K. (2013). *Natural area tourism: Ecology, impacts and management* (2nd ed.). Channel View Publications.
- Noor, R. R. (2014). *Keanekaragaman genetik kucing domestik Indonesia*. IPB Press.
- Pierre, J., & Peters, B. G. (2020). *Governance, politics and the state* (2nd ed.). Red Globe Press.
- Porter, M. E., & Kramer, M. R. (2011). Creating shared value. *Harvard Business Review*, 89(1–2), 62–77.
- Porter, N., Ginn, F., & Jones, P. (2020). Living with cats in heritage cities: Multispecies urbanism and tourism. *Environment and Planning E: Nature and Space*, 3(2), 353–372. <https://doi.org/10.1177/2514848619887277>
- Robbins, P. (2012). *Political ecology: A critical introduction* (2nd ed.). Wiley-Blackwell.
- Robbins, P. (2020). *Political ecology: A critical introduction* (3rd ed.). Wiley-Blackwell.
- Santosa, Y., Zuhud, E. A. M., & Kartodihardjo, H. (2017). Governance of wildlife conservation in Indonesia. *Biodiversitas*, 18(2), 734–742. <https://doi.org/10.13057/biodiv/d180245>
- Scheyvens, R. (1999). Ecotourism and the empowerment of local communities. *Tourism Management*, 20(2), 245–249. [https://doi.org/10.1016/S0261-5177\(98\)00069-7](https://doi.org/10.1016/S0261-5177(98)00069-7)
- Shen, Y. (2024). Unique cat culture in Japan. *Communications in Humanities Research*, 39, 63–69.
- Stone, M. T., & Nyaupane, G. P. (2018). Protected areas, wildlife-based community tourism and community livelihoods. *Journal of Sustainable Tourism*, 26(11), 1957–1972. <https://doi.org/10.1080/09669582.2018.1464201>
- The Jakarta Post. (2022, November 14). Madurese Busok cat gets global recognition. *The Jakarta Post*. <https://www.thejakartapost.com/culture/2022/11/14/madurese-busok-cat-gets-global-recognition.html>
- Wahlquist, C. (2018, November 3). Cat tourism: Can a bunch of kitties save dying towns in Asia? *ABC News*. <https://www.abc.net.au/news/2018-11-03/cat-tourism-can-a-bunch-of-kitties-save-dying-towns-in-asia/10458128>
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Sage Publications.

Peraturan dan perundang-undangan

Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 1 Tahun 2025 tentang Desa Wisata.

Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.